

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan hasil dari pengujian mengenai pengaruh dari tiga variabel independen yaitu dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, dan luas wilayah terhadap variabel dependen kemandirian keuangan daerah. Terdapat 34 provinsi yang ada di Indonesia yang menjadi populasi dalam penelitian ini dan terseleksi 31 provinsi yang menjadi sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel yang tepat sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan sampel tersebut menghasilkan 62 objek observasi pada jangka waktu 2 Tahun dalam penelitian ini yaitu Tahun 2018 dan Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel independen yaitu dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen kemandirian keuangan daerah;

2. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen kemandirian keuangan daerah;
3. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel independen yaitu luas wilayah berpengaruh negative signifikan terhadap variabel dependen kemandirian keuangan daerah.

5.2 Implikasi

Penelitian ini memiliki hasil yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu dana alokasi umum mempengaruhi variabel dependen kemandirian keuangan daerah ke arah yang positif, sedangkan luas wilayah mempengaruhi variabel dependen ke arah negatif. Akan tetapi, variabel independen lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi variabel dependen kemandirian keuangan daerah. Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap akuntansi dan penganggaran keuangan pemerintah daerah di Indonesia agar dapat terciptanya pemerataan kemandirian keuangan daerah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, melalui penelitian ini terdapat dua implikasi yaitu teoritis dan implikasi praktis yang akan diimplikasikan sebagai berikut:

a. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan di bidang akuntansi sektor publik mengenai kemandirian keuangan daerah. Melalui penelitian ini, semoga dapat menjadi referensi

lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya yang sejenis. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta informasi-informasi baru serta sebuah pemikiran baru dalam dunia akuntansi pemerintahan yang terkait dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, dan luas wilayah terhadap kemandirian keuangan daerah.

b. Implikasi Praktis

1. Pemerintah Pusat

Melalui penelitian ini dapat memberikan informasi untuk pemerintah pusat dilihat dari faktor dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah pusat dapat mendorong pemerintahan daerah agar dapat mengelola dan memanfaatkan dana yang diperoleh secara lebih baik lagi kedepannya, serta mengelola aset-aset yang di miliki sehingga dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan masing-masing daerah.

2. Pemerintah daerah

Melalui penelitian ini pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang bisa menentukan kebijakan dan strategi daerah terkait variabel independen yang berpengaruh yaitu dana alokasi umum dan luas wilayah guna mencapai kemandirian keuangan daerah yang lebih baik. Contohnya memanfaatkan segala aset yang dimiliki agar bisa menjadi aset yang produktif, dan juga meningkatkan produktifitas kegiatan perekonomian sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan

daerah. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran dan acuan sebagaimana seharusnya pemerintah daerah yang ada di Indonesia dapat mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih produktif lagi.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berikut merupakan beberapa hal yang menjadi keterbatasan pada penelitian ini:

1. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti hanya terbatas dengan melakukan pengamatan yang singkat selama periode 2 tahun yaitu tahun 2018-2019 sehingga jumlah observasi penelitian hanya berjumlah 62.
2. Variabel independen penelitian ini terbatas, yaitu dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, dan luas wilayah. Variabel independen penelitian ini menerangkan variabel dependen masih sangat rendah, sebesar 12.2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak faktor-faktor lainnya selain variabel independen penelitian ini yang diduga mampu menerangkan terjadinya variabel dependen kemandirian keuangan daerah dengan jauh lebih baik lagi.
3. Kemandirian keuangan daerah yang diukur hanya melihat dari aspek total pendapatan daerah dengan rumus yang di terapkan oleh DJPK Kemenkeu RI sementara ada pengukuran lain yang melihat kemandirian daerah dari aspek lainnya yaitu bantuan dari pemerintah pusat atau Pemerintah provinsi dan juga pinjaman.

5.4 Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya

Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka rekomendasi yang bisa peneliti berikan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti hanya melakukan penelitian ini hanya dengan rentang waktu dua tahun. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya periode penelitian bisa diperluas dengan menambah tahun sehingga jumlah observasinya menjadi lebih banyak dan hasilnya dapat lebih baik dalam merepresentasikan kemandirian keuangan daerah;
2. Variabel-variabel independen pada penelitian ini menerangkan variabel dependen hanya sebesar 12.2%, hal ini masih tergolong rendah dikarenakan 87.8% dapat diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya bisa menambahkan atau mengganti variabel sehingga dapat dilihat faktor apa saja yang dapat menerangkan kemandirian keuangan daerah dengan lebih baik. Faktor-faktor lainnya baik dari segi keuangan maupun lingkungan, seperti PAD (Pendapatan Asli Daerah), DBH (Dana Bagi Hasil), DAK (Dana Alokasi Khusus), dana keistimewaan, belanja modal, belanja pegawai, pajak daerah, dana perimbangan, ukuran daerah, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, dan lainnya dapat ditambahkan dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.
3. Penggunaan rumus kemandirian keuangan daerah menggunakan perumusan yang diterapkan oleh DJPK Kementerian Keuangan Republik

Indonesia. Oleh karena itu, bagi penelitian selanjutnya maka bisa menggunakan perumusan kemandirian keuangan daerah yang lain seperti yang di rumuskan oleh para ahli.



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*